

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur:

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus Mulya Karsona, 2011, “*Pengertian Korupsi*” dalam Nanang T. Puspito (ed.), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf>
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Chairul Huda, 2013, *Dari ‘Tiada Pidana tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Djamludin Ancok, 2005, *Di Balik Putusan Hakim*, Surabaya: Dieta Persada.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Pustaka Tinta Mas.
- Isnu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Grup.
- I Made Pashak Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jur Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun B. N, 1992, *DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, Jakarta: Visi Media.
- Marpaung Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2011, *Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Edisi Baru, Cetakan ke-18*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Philipus M. Hadjon dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I, Cetakan ke-II*, Semarang: Yayasan Soedarto Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, 1983, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula Semarang.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Internet:**

Albert Aries, “*Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana*”, HukumOnline, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, pada tanggal 5 Desember 2016.

BeritaSatuTV, Dialog: Cabut Hak Politik Koruptor Mahkamah Agung memperberat hukuman bagi terpidana kasus korupsi kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaq, Youtube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Zudas9UgANU> , pada tanggal 29 Juli 2018.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, 13 November 2016.

Ilman Hadi, “*Prinsip Tanggung Jawab Pidana*”, HukumOnline, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fee9b5e8c4d6/prinsip-tanggung-jawab-pidana>, pada tanggal 5 Desember 2016.

